

Ringkasan Eksekutif

Paket Stimulus Hijau untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Sektor Energi



Studi ini untuk mendukung program B3-low carbon Bappenas



International
Labour
Organization



Copyright © United Nations Development Programme 2021

First published 2021, on behalf of PAGE

The report is published as part of the Partnership for Action on Green Economy (PAGE) – an initiative by the United Nations Environment Programme (UNEP), the International Labour Organization (ILO), the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).

This publication may be reproduced in whole or in part and in any form for educational or non-profit purposes without special permission from the copyright holder, provided acknowledgement of the source is made. The PAGE Secretariat would appreciate receiving a copy of any publication that uses this publication as a source.

No use of this publication may be made for resale or for any other commercial purpose whatsoever without prior permission in writing from the PAGE Secretariat.

Citation

PAGE 2021, Ringkasan Eksekutif Paket Stimulus Hijau untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Energi

All photos © UNDP Indonesia, 2021

Disclaimer

This publication has been produced with the support of PAGE funding partners. The contents of this publication are the sole responsibility of PAGE and can in no way be taken to reflect the views of any Government. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the PAGE partners concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning delimitation of its frontiers or boundaries. Moreover, the views expressed do not necessarily represent the decision or the stated policy of the PAGE partners, nor does citing of trade names or commercial processes constitute endorsement.



Ringkasan Eksekutif

Paket Stimulus Hijau untuk Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Energi



International
Labour
Organization



Ringkasan Eksekutif

Pemerintah telah mengkomodifikasi pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020 – 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020. Sebagai tindak lanjut dari penetapan RPJMN, Kementerian ESDM telah menetapkan Rencana Strategis melalui Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2020. Berikut adalah ringkasan dari target-target yang ditetapkan dalam kedua Peraturan tersebut terkait dengan pembangunan rendah karbon sektor energi:

Target	2024
Porsi EBT dalam bauran energi Nasional	19,5%
Kapasitas terpasang EBT (GW)	19,2
Pemanfaatan biofuel untuk domestik (Juta kL)	17,4
Intensitas energi primer (SBM/Rp. Milyar)	133,8
Penurunan integritas final (SBM/Rp. Milyar)	0,8
Penurunan emisi GRK	27,3%
Penurunan intensitas emisi GRK	24%

Tabel 1 Target RPJMN dan Renstra Kementerian ESDM

Target energi terbarukan dalam bauran energi sebesar 19,5% pada tahun 2024 dikhawatirkan akan sulit dicapai apabila tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan dan regulasi, pola pengadaan energi terbarukan, dan penyediaan insentif fiskal agar energi terbarukan dapat bersaing dengan pembangkit berbasis fosil, mengingat hingga tahun 2019 energi terbarukan baru mencapai 9,15% dalam bauran energi dengan kapasitas terpasang 10,16 GW.

Pemerintah sudah menyediakan berbagai insentif fiskal untuk sektor energi, seperti tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk impor, maupun pengurangan harga gas untuk pembangkit. Yang paling diuntungkan dengan insentif fiskal ini adalah proyek-proyek dengan nilai investasi besar. Sementara itu, mayoritas energi terbarukan yang akan dibangun adalah proyek-proyek dengan nilai investasi yang relatif lebih kecil, sehingga tidak dapat memanfaatkan fasilitas insentif fiskal secara maksimal, khususnya untuk tax holiday. Disisi lain, banyak proposal pembiayaan proyek, termasuk dokumen pendukungnya, yang disampaikan ke Lembaga Pembiayaan/Perbankan kurang memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk menyediakan pembiayaan. Sementara itu, kurangnya pemahaman tentang resiko investasi energi terbarukan menyebabkan Lembaga Pembiayaan/Perbankan mempersyaratkan penyediaan jaminan berupa asset pada saat menyediakan pendanaan untuk investasi energi terbarukan.

Peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan energi merupakan potensi yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal, meskipun banyak kegiatan yang sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa mengeluarkan biaya maupun dengan biaya murah. Beberapa hambatan utama dalam peningkatan efisiensi ini terutama terkait dengan harga energi yang relatif murah, pendanaan untuk efisiensi energi yang tidak tersedia, dan kurangnya insentif fiskal yang disediakan pemerintah untuk mendorong investasi efisiensi energi.

Pemerintah perlu menyediakan berbagai stimulus yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha agar dapat mendorong pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra

ESDM 2020 – 2024. Berikut adalah usulan stimulus yang akan dapat mendorong pemanfaatan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi demi mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra ESDM 2020 - 2024:

Stimulus	Alokasi dana	Jumlah proyek yang didukung	Penurunan emisi GRK tCO ₂ per tahun	Lapangan kerja (orang)	Keterangan
Tax holiday	Total nilai investasi sekitar USD 20,5 milyar	Sekitar 400 proyek, tergantung kapasitas per proyek	34.450.991 tCO ₂ per tahun	641.750 orang selama masa konstruksi dan 29.772 orang selama masa operasi	
Tax allowance untuk 10 tahun					
Pembebasan bea masuk					
PPN tidak dipungut					Nilai PPN yang tidak dipungut USD 1.333 juta
Penjamin pinjaman (USD)	111 juta				Asumsi premi penjamin sebesar 1.5% dari nilai pinjaman, premi dibayar masing-masing 50% oleh pemerintah langsung
Dana pengembangan ET	300 Milyar	100	1.226.400 - 3.985.800	10.000 - 30.000	
Dana pembangunan PLTS Atap (Rp)	3 Triliyun	200.000	204.400	1.000.000	Dibutuhkan 5 orang untuk pemasangan setiap PLTS Atap
Dana efisiensi (Rp)	300 Milyar	600			

Tabel 2 Ringkasan usulan stimulus

Penyediaan stimulus ini akan berkontribusi terhadap:

1. Pemulihan perekonomian melalui berbagai kegiatan pembangunan di sektor energi terbarukan dan efisiensi energi;
2. Tersedia lapangan kerja baru terutama di daerah dimana pengembangan energi terbarukan dan kegiatan efisiensi energi dilaksanakan;
3. Peningkatan perekonomian daerah dengan adanya aktivitas pembangunan sebagai dampak ikutan dari pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, diantaranya:
 - a. Penyediaan bahan-bahan bangunan untuk konstruksi dari daerah sekitar lokasi proyek energi terbarukan;
 - b. Penyediaan penginapan, makanan dan minuman, kebutuhan pekerja pembangunan pembangkit energi terbarukan;
 - c. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sebagai bentuk komitmen CSR dari perusahaan;
4. Terjadinya penurunan emisi GRK.

Insentif fiskal untuk pengembangan energi terbarukan

Pemerintah menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan energi terbarukan berdasarkan aturan yang ada ataupun perluasan aturan, khususnya berupa:

1. Tax holiday sedikitnya 10 tahun tanpa dibatasi oleh besaran investasi;
2. PPN untuk pengadaan barang dan jasa dalam negeri tidak dipungut. Penyediaan fasilitas ini akan mengurangi beban investasi yang menjadi tanggungan investor energi terbarukan. Untuk merealisasikan rencana pengembangan energi terbarukan dengan kapasitas terpasang hingga 9.050,30 MW diusulkan untuk tidak memungut PPN untuk pengadaan jasa dan barang dalam negeri (TKDN) sebesar USD 1.333 juta, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Pembangkit	Target MW	Investasi/MW (Juta USD)	Total Investasi (Juta USD)	TKDN	PPN tidak dipungut (Juta USD)
PLTA	3.909,80	2,3	8.993	75%	674
PLTP	1.027,00	5	5.135	65%	334
PLTS	2.089,40	1	2.089	40%	84
PLTB	729,00	2,3	1.677	20%	34
Bioenergi	1.295,10	2	2.590	80%	207
Jumlah	9.050,30		20.484		1.333

Tabel 3 Usulan stimulus PPN tidak dipungut untuk RKP 2022

3. Pembebasan bea masuk impor barang modal dan sukucadang, dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang sudah berjalan saat ini, namun kebijakan perlu diperluas agar sukucadang yang dibutuhkan selama masa pengoperasian pembangkit energi terbarukan dapat memanfaatkan fasilitas ini;
4. Tax allowance berupa pengurangan PPh, percepatan depresiasi dan amortisasi, penurunan PPh untuk dividen investor, dilaksanakan berdasarkan pengaturan yang sudah ada saat ini;

Dana pengembangan energi terbarukan

Penyediaan dana pengembangan energi terbarukan bertujuan meningkatkan kualitas dokumen pengembangan proyek ET sehingga Lembaga Pembiayaan/Perbankan bersedia untuk menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk investasi energi terbarukan. Dana pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat diakses oleh pengembang energi terbarukan yang sudah memiliki dokumen studi kelayakan (feasibility study) dan masuk dalam Daftar Pengembang Terseleksi (DPT) di PLN. Dana yang disediakan akan digunakan untuk perbaikan kualitas dokumen proyek, khususnya feasibility study (FS), detailed engineering design (DED), dokumen lingkungan, akuisisi data yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan FS dan DED. Dengan kualitas dokumen yang lebih baik, Lembaga Pembiayaan dapat menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk membangun proyek energi terbarukan.

Diusulkan agar pada tahun 2022 Pemerintah menyediakan dana sebesar Rp. 300 milyar untuk 100 proyek energi terbarukan dengan target kapasitas terpasang 1.000 MW. Dana ini akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana yang ditunjuk oleh Pemerintah.



Grafik 1 Proses pengajuan Dana Pengembangan Energi Terbarukan

Apabila semua proyek terbangun, maka akan berpotensi menurunkan emisi GRK antara 1,226,400 tCO₂ per tahun (PLTS) hingga 3,985,800 tCO₂ per tahun (PLTA). Sebagai kompensasi, pengembang energi terbarukan akan menyerahkan kepada pemerintah sertifikat penurunan emisi maksimal 60,000 (setara dengan penurunan emisi sebesar 60,000 tCO₂) penurunan emisi GRK yang dihasilkan oleh proyek yang didanai, senilai dana yang diterima dari pengelola dana.

Penjaminan pinjaman untuk pengembangan energi terbarukan

Penyediaan penjaminan pinjaman yang dikombinasikan dengan peningkatan kualitas dokumen pengembangan energi terbarukan dapat mendorong penyediaan pinjaman oleh Lembaga Pembiayaan/

Perbankan dalam negeri. Dengan total investasi yang dibutuhkan untuk membangun 9.050,80 MW dengan total investasi sebesar USD 20,5 milyar, Pemerintah diharapkan dapat menyediakan dana penjaminan sebesar USD 108 juta untuk membayar 50% dari premi penjaminan (premi penjaminan diasumsikan sebesar 1.5% dari nilai pinjaman).

Pembangkit	Target MW	Investasi/MW (Juta USD)	Total Investasi (Juta USD)	PPN tidak dipungut (Juta USD)
PLTA	3.909,80	2,3	8.993	47
PLTP	1.027,00	5	5.135	27
PLTS	2.089,40	1	2.089	11
PLTB	729,00	2,3	1.677	9
Bioenergi	1.295,10	2	2.590	14
Jumlah	9.050,30		20.484	108

Tabel 4 Usulan penyediaan penjaminan untuk RKP 2022

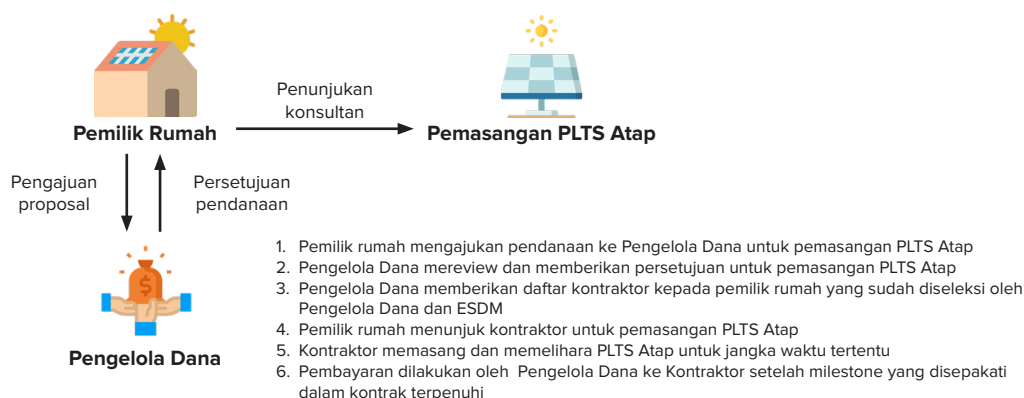
Pemerintah dapat mengurangi besaran penjaminan dengan asumsi penjaminan untuk PLTP tidak diperlukan, hanya sekitar 40% dari pembangunan PLTA akan menggunakan pendanaan dari dalam negeri, demikian juga untuk PLTS dan PLTB diasumsikan masing-masing hanya 30% yang akan menggunakan pendanaan dalam negeri. Dengan demikian, Pemerintah hanya perlu menyediakan dana untuk membayar premi penjaminan sebesar USD 38 juta atau sekitar Rp. 557,01 milyar.

Pembangkit	Target (MW)	Investasi/MW (Juta USD)	Total Investasi (Juta USD)	Penjaminan (Juta USD)
PLTA	1.563,92	2,3	3.597	19
PLTP	-	5	-	-
PLTS	626,82	1	627	3
PLTB	218,70	2,3	503	3
Bioenergi	1.295,10	2	2.590	14
Jumlah	3.704,54		7.317	38

Tabel 5 Opsi penjaminan untuk energi terbarukan

Dana bergulir untuk pemasangan PLTS Atap

Pemerintah dapat menyediakan dana sebesar IDR 3,000,000,000,000 untuk pemasangan 200 MWp PLTS Atap untuk konsumen PLN di daerah dengan BPP tinggi, seperti di Nias, Mentawai, Wamena, Sarma, dan lain-lain. Dengan adanya PLTS Atap maka energi yang disalurkan oleh PLN kepada pelanggan tersebut akan berkurang, sehingga akan mengurangi beban subsidi Pemerintah. Program ini akan mengurangi emisi gas rumahkaca hingga 204,400 tCO₂ per tahun.



Grafik 2 Proses pengajuan Dana Pemasangan PLTS Atap

Pendanaan peningkatan efisiensi energi untuk UKM melalui KUR

UKM merupakan salah satu dari banyak pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi. Banyak UKM yang mengalami kesulitan karena berkurangnya pemasukan sehingga kemampuan untuk membayar biaya operasi menjadi lebih sulit. Untuk meringankan beban UKM Pemerintah dapat menyediakan pinjaman melalui KUR dengan bunga 6%, yang mana yang mana pinjaman ini sudah termasuk penjaminan oleh Lembaga Penjaminan milik Pemerintah.

Besaran KUR yang dapat disediakan untuk setiap perusahaan maksimal Rp. 500 juta, sesuai dengan batasan yang dapat diberikan oleh perbankan. Penyediaan pendanaan untuk kegiatan efisiensi energi ini dapat diintegrasikan dengan stimulus yang disediakan Pemerintah sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penciptaan lapangan kerja dengan penyediaan stimulus

Penyediaan berbagai stimulus akan dapat mendorong pembangunan rendah karbon, khususnya pengembangan energi terbarukan dan implementasi kegiatan efisiensi energi. Hal ini selain bertujuan untuk mencapai target RPJMN dan Renstra Kementerian ESDM, juga akan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Penyediaan insentif fiskal berupa tax holiday, PPN tidak dipungut, penyediaan tax allowance dan dikombinasikan dengan penyediaan penjaminan pinjaman akan dapat memperbaiki keekonomian pembangkit energi terbarukan sehingga akan dapat bersaing dengan pembangkit berbasis fosil.

Pembangkit	Target (MW)	TK masa konstruksi (Orang)	TK masa konstruksi (Orang/MW)	TK masa operasi (Orang)	TK masa operasi (Orang/MW)
PLTA	1.563,92	262.000	67	6.550	1,7
PLTP	-	266.000	259	2.850	2,8
PLTS	626,82	15.750	8	1.575	0,8
PLTB	218,70	33.000	45	600	0,8
Bioenergi	1.295,10	65.000	50	18.200	14,1
Jumlah	3.704,54	641.750		29.775	

Tabel 24 – Penciptaan lapangan kerja

Sementara itu, penyediaan dana pengembangan energi terbarukan untuk 100 proyek dapat menciptakan lapangan kerja antara 10.000 orang – 30.000 orang, dengan asumsi bahwa dana ini digunakan untuk pengembangan PLTS atau PLTM kapasitas hingga 10 MW. Diperkirakan bahwa pembangunan PLTS akan membutuhkan sekitar 100 orang selama masa konstruksi (1 – 1,5 tahun), sementara pembangunan PLTM membutuhkan sekitar 300 orang selama masa konstruksi (2 – 3 tahun).

Penyediaan dana untuk pembangunan PLTS Atap dengan kapasitas terpasang hingga 200 MWp dapat menciptakan hingga 1.000.000 lapangan kerja, dengan asumsi akan terpasang 200.000 PLTS Atap, yang mana pemasangan setiap PLTS Atap melibatkan sekitar 5 orang untuk pekerjaan logistik dan pemasangan.

PAGE PARTNERSHIP FOR ACTION ON GREEN ECONOMY

Indonesia has made significant progress in mainstreaming green economy activities into the country's macroeconomic and national development plans. The country has also increased their global climate commitments – including setting a net zero emissions target by 2060. However, the energy sector in Indonesia remains the country's second-largest carbon emitter, with national power generation being highly dependent on fossil fuels – particularly coal. As such, energy transition is a critical mechanism to achieving Indonesia's climate targets and green economy ambitions.

Energy transition will, however, create significant employment changes in the energy and electricity sectors. In the face of such changes, developing a supportive policy ecosystem to enable future green jobs growth and to ensure a Just Transition is critical. This green jobs policy readiness assessment aims to develop a baseline perspective of current green jobs and Just Transition policy frameworks in Indonesia, with a focus on the energy sector. To this end, the report explores recommendations for measures aimed at supporting the labour market, from both the supply and demand sides, as well as for overarching measures that will promote the enabling environment needed to ensure a Just Transition process.

For further information:

PAGE Secretariat
UN Environment Programme
Resources & Markets Branch
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Chatelaine-Geneva
Switzerland
page@un.org



www.un-page.org



twitter.com/_un_page



<https://www.linkedin.com/company/un-page/>



https://www.instagram.com/_un_page/

